

## PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Jessica Rissdiana  
jessicarissdiana12@gmail.com  
Akhmad Riduwan

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*This research aimed to find out the effect of Corporate Governance which was referred to as three variables, namely Commissioner Board Independence, Independent Audit Committee, Institutional Ownership, and companies' characteristic which was referred to as firm size; on the disclosure of anti-corruption policy. Moreover, the data were secondary in the form of annual reports of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2019-2021. Furthermore, the data collection technique used purposive sampling, in which the sample was based on the criteria given. The population was 30 manufacturing companies. Additionally, the data analysis technique used multiple linear regression. The result showed that (a) Commissioner Board Independence had a positive effect on the disclosure of anti-corruption policy, (b) Independent Audit Committee had a negative effect on the disclosure of anti-corruption policy, (c) institutional ownership did not affect the disclosure of anti-corruption policy, and (d) firm size had a positive effect on the disclosure of anti-corruption policy.*

*Keywords: commissioner board independence, independent audit committee, institutional ownership, firm size, anti-corruption policy*

### ABSTRAK

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh *Corporate Governance* yang diproksikan menjadi tiga variabel yaitu Independensi Dewan Komisaris, Komite Audit Independen, Kepemilikan Institusional, serta Karakteristik Perusahaan yang diproksikan dengan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Kebijakan Anti Korupsi. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dengan menganalisis data sekunder yaitu laporan tahunan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (a) Independensi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Kebijakan Anti Korupsi; (b) Komite Audit Independen berpengaruh negatif terhadap Pengungkapan Kebijakan Anti Korupsi; (c) Kepemilikan Intitusional tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan Kebijakan Anti Korupsi; (d) Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Kebijakan Anti Korupsi.

Kata Kunci: independensi dewan komisaris, komite audit independen, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, kebijakan anti korupsi

### PENDAHULUAN

Dunia bisnis di Indonesia bukan hanya cenderung terhadap kinerja keuangan perusahaan saja tetapi juga perlu adanya upaya untuk meningkatkan kredibilitas serta komitmen terhadap praktik bisnis yang bersih dan beretika didalam sebuah perusahaan. Namun pada saat ini yang terjadi dalam perkembangan bisnis yang pesat sering tidak diimbangi dengan pengendalian internal yang baik. Sehingga dapat terjadinya kasus korupsi yang menjerat perusahaan-perusahaan di Indonesia, dimana dapat menjadi bukti lemahnya

fungsi tata kelola yang ada di perusahaan. Korupsi sampai saat ini masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Berdasarkan data dari website <https://acch.kpk.go.id> dimana yang menunjukkan bahwa korupsi paling banyak menjerat anggota DPR dan DPRD serta sektor swasta. Korupsi menjadi musuh bersama karena memiliki dampak kerugian baik keuangan maupun non keuangan dan dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan.

*Good Corporate Governance* (GCG) sebagai salah satu bentuk pengendalian internal sangat perlu dilakukan untuk meminimalisir segala bentuk perilaku menyimpang yang ada di perusahaan. GCG mampu digunakan sebagai alat untuk mencegah korupsi karena melalui penerapan asas responsibilitas dan transparansi menjadi kunci utama terciptanya keterbukaan informasi di perusahaan. Selain GCG, faktor internal yang diduga merupakan faktor yang mempengaruhi konsep anti korupsi adalah karakteristik perusahaan. Karakteristik perusahaan merupakan keadaan yang melekat pada perusahaan, karakteristik dari suatu perusahaan dapat berbeda dengan perusahaan yang lain tergantung dengan kondisi perusahaan itu sendiri. Karakteristik perusahaan yang salah satunya ukuran perusahaan yang terdiri dari jenis industri dan ukuran perusahaan itu sendiri, menggunakan atribut dari GCG dan atribut dari karakteristik perusahaan banyak dilakukan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pengungkapan kebijakan anti korupsi. Salah satu informasi yang disoroti adalah mengenai pengungkapan kebijakan anti korupsi di perusahaan.

Pengungkapan kebijakan anti korupsi merupakan salah satu bentuk pengungkapan sukarela, dikarenakan peraturan di Indonesia yang berkaitan dengan GCG dan keberlanjutan tidak menyebutkan secara spesifik kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan informasi anti korupsi. Salah satu aspek keberlanjutan yang mungkin belum banyak diketahui oleh komunitas bisnis adalah aktivitas dan anti korupsi. Pemerintah Indonesia, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2017). Sebelumnya, pada tahun 2007, Pemerintah mulai mengatur praktik dan pelaporan *Good Corporate Governance*, yang merupakan bagian dari konsep dalam Undang-Undang 40 Tahun 2007 (Pemerintah Republik Indonesia, 2007). Namun, peraturan-peraturan tersebut hanya menyebutkan bahwa perusahaan wajib melakukan pelaksanaan dan melaporkannya dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan, tidak menyebutkan aspek keberlanjutan mana yang harus dilakukan dan dilaporkan. Oleh karena itu, wajar bila aspek korupsi ini dianggap sepele oleh banyak kalangan. Isu korupsi menjadi masalah serius di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Korupsi bisa terjadi baik di sektor publik maupun sektor swasta. Kaitannya dengan sektor swasta, sehingga pengungkapan kebijakan anti korupsi sangat diperlukan agar para penanggung jawab kepentingan mengetahui upaya perusahaan dalam menciptakan bisnis yang beretika dan usaha untuk menjaga kepentingan seluruh stakeholdernya dan juga dapat mengidentifikasi komitmen perusahaan untuk memberantas korupsi. Adapun didalam program kebijakan anti korupsi memaparkan diantaranya mengenai larangan suap, anti gratifikasi, kerjasama dengan KPK untuk melawan gratifikasi, serta membentuk dan menerapkan sistem whistleblowing.

Berdasarkan Uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat disusun dalam penelitian ini sebagai berikut: Apakah independen dewan komisaris, komite audit independensi, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan kebijakan anti korupsi?, sedangkan tujuan dari penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut: Untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh independen dewan komisaris, komite audit independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan kebijakan anti korupsi.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Agensi

Teori Keagenan menyatakan bahwa mekanisme pengawasan yang diterapkan perusahaan dalam bentuk GCG, akan mampu mengurangi konflik kepentingan dan asimetri informasi untuk meredakan perbedaan kepentingan dari berbagai pihak dalam perusahaan. Karena dengan adanya implementasi GCG di perusahaan, pengawasan menjadi lebih ketat dan independensi dalam pengambilan keputusan dapat terjaga. Luh (2021) mengatakan bahwa hubungan keagenan muncul karena adanya kontrak antara pemilik (principal) dengan seseorang (agent) yang memiliki kemampuan profesional untuk melakukan pekerjaan atas nama pemilik dan perusahaan. Teori keagenan menjelaskan tentang adanya pemisahan fungsi antara pemilik perusahaan (principal) dengan pengelola perusahaan (agent). Perusahaan yang mana sebagai titik temu antara pemilik dan pengelola berpotensi menimbulkan konflik antara pemilik dan pengelola karena adanya kemungkinan pekerjaan yang dilakukan pengelola tidak sesuai dengan harapan pemilik perusahaan.

### Teori Legitimasi

Teori Legitimasi dianggap menjadi hal krusial bagi perusahaan karena legitimasi dari masyarakat merupakan faktor yang menentukan perkembangan dan kelangsungan hidup perusahaan (Karim dan Sasanti, 2016). Untuk mendapat legitimasi tersebut, maka perusahaan harus mengkomunikasikan aktivitas lingkungan dengan melakukan pengungkapan sosial dan lingkungan (Barthelot dan Robert, 2011). Teori legitimasi menjelaskan bahwa tanggung jawab social dilakukan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat dimana perusahaan berada. Legitimasi dapat menyebabkan perusahaan terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan dengan meningkatkan penilaian didalam perusahaan tersebut. Teori legitimasi menyatakan organisasi bukan hanya memperhatikan hak publik. Legitimacy theory menyatakan bahwa adanya organisasi yang harus melakukan dan mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka telah melakukan kegiatan untuk batasan didalam norma-norma masyarakat (Rustiarini, 2011).

### Korupsi

Korupsi merupakan masalah serius diseluruh dunia, menurut *Corruption Perception Indeks* (CPI) tahun 2018 yang diambil dari Transparency International (2018) Indonesia menempati peringkat 89 dari 180 negara dengan dengan nilai 38. Hasil tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi di Indonesia yang masih tinggi. Untuk mengurangi tingkat korupsi, dibutuhkan peraturan dan regulasi yang tepat dan diterapkan dengan konsisten. Pemerintah telah membuat banyak upaya untuk memperbaiki situasi ini dengan mengembangkan banyak peraturan. Tiga lembaga terkemuka di Indonesia yang menggalakkan program kebijakan anti korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Transparency International Indonesia. Pemerintah Indonesia dan pihak berwenang lainnya berkomitmen untuk melawan korupsi dan penyuapan.

### Good Corporate Governance (GCG)

*Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem, dan proses yang dilakukan oleh organ perusahaan seperti Direksi, Dewan Komisaris, dan RUPS dalam rangka memberikan feedback kepada shareholder, namun tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku Putra (2016). GCG merupakan suatu gagasan harus diterapkan dalam suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengurangi gap antara manajer dan investor (Widyatama, 2014). Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* terdapat lima asas GCG yakni (1) Transparansi, (2) Akuntabilitas, (3) Responsibilitas, (4) Independensi, serta (5) Kewajaran dan Kesetaraan.

### **Komisaris Independen**

Menurut Peraturan OJK No.33/POJK.04.2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar emiten, yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan atau Pemegang Saham Pengendali, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Independensi yang dimiliki dewan komisaris diharapkan mampu menghadirkan pengawasan yang lebih efektif dan semakin mendorong perusahaan dalam mengungkapkan kebijakan anti korupsi dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dan bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholder.

### **Komite Audit Independen**

Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus (Iriene, 2021). Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance, Komite Audit merupakan komite penunjang Dewan Komisaris yang bertugas untuk (1) Memastikan laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi, (2) Memastikan terlaksananya pengendalian internal yang baik, (3) Memastikan terlaksananya audit internal maupun eksternal sesuai standar audit yang berlaku dan (4) Memastikan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Dengan independensinya, komite audit diharapkan dapat mengatasi konflik kepentingan oleh auditor luar yang menyediakan jasa konsultasi bagi perusahaan.

### **Struktur Kepemilikan Institusional**

Menurut Gumilang *et al.*, (2015) kepemilikan institusional merupakan suatu keadaan dimana struktur kepemilikan saham mayoritas suatu perusahaan dimiliki oleh sebuah lembaga seperti, perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, koperasi, institusi pemerintah dan kepemilikan institusi lainnya. Investor institusional biasanya memiliki hak yang lebih besar dalam suatu perusahaan karena jumlah saham yang diinvestasikan lebih besar daripada investor lainnya. Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisir konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Iriene, 2019).

### **Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan merupakan cerminan kegiatan operasional klien dan juga menggambarkan pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu Iriene dan Octavianus (2019). Artinya bahwa jika perusahaan tersebut tergolong perusahaan yang besar, maka pendapatan yang diperoleh akan tinggi. Perusahaan besar tentu akan mendapat perhatian lebih dari para stakeholder dan pemangku kepentingan lainnya karena perusahaan tersebut dianggap telah berhasil menjalankan bisnisnya dan berhasil membangun image serta kepercayaan publik. Menurut UU Republik Indonesia No. 20 tahun 2008, menyebutkan bahwa ada 4 jenis ukuran perusahaan yang dapat dinilai dari jumlah penjualan dan aset yang dimiliki oleh perusahaan yakni (1) Perusahaan ukuran mikro, (2) Perusahaan kecil, (3) Perusahaan ukuran menengah, dan (4) Perusahaan besar.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Independensi Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Kebijakan Anti Korupsi**

Kehadiran Komisaris Independen dalam komposisi Dewan Komisaris akan meminimalkan konflik kepentingan dan juga intervensi dari pihak manapun, sehingga pengambilan keputusan oleh Direksi dilakukan secara objektif. Sebagai pihak yang tidak

mempunyai intervensi atau konflik kepentingan di dalam perusahaan, komisaris independen hanya berfokus pada kelangsungan hidup perusahaan dan memastikan perusahaan dikelola dengan baik. Oleh karena itu, komisaris independen akan mendorong pihak manajemen melakukan upaya untuk menciptakan lingkungan bisnis yang bersih dan sehat dengan melakukan pengungkapan informasi yang akan memberi *feedback* baik bagi perusahaan tersebut. Penelitian Healy dan Serafeim (2015) yang dikutip dalam de'Melo (2015), yang menyimpulkan bahwa proporsi komisaris independen mempunyai hubungan yang positif terhadap pengungkapan kebijakan anti korupsi.

H1: Independensi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan anti korupsi.

### **Pengaruh Komite Audit Independen Terhadap Pengungkapan Kebijakan Anti Korupsi**

Tugiman (dalam Iriene, 2019) menyatakan bahwa anggota komite audit disamping harus ahli di bidangnya juga dituntut untuk mengetahui dan menguasai bidang akuntansi dan auditing serta mengetahui dan menguasai analisa laporan keuangan. Komite audit yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan atau keuangan telah dibekali ilmu mengenai *fraud* dan tentu lebih memahami mengenai berbagai macam bentuk *fraud*, faktor-faktor yang mendorong terjadinya *fraud* (*fraud triangle*), dan juga lebih memahami mengenai tindakan pencegahan atau mekanisme untuk meminimalisir terjadinya *fraud*. Atau dengan kata lain komite audit yang berkompeten lebih mampu meminimalkan kesalahan pengukuran akuntansi, berkurangnya pengungkapan akuntansi yang tidak tepat dan meminimalkan tindakan ilegal dan tindakan kecurangan manajemen. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Allegrini dan Greco (2013) Dengan demikian, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2: Komite Audit Independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan anti korupsi.

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan Kebijakan Anti Korupsi**

Keberadaan kepemilikan institusional disuatu perusahaan akan mendukung praktik anti korupsi di perusahaan sebab kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisir konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham (Iriene dan Octavianus, 2019). Investor institusional umumnya memiliki hak lebih karena saham yang dimiliki di perusahaan lebih banyak dibandingkan dengan investor lain. Kondisi tersebut akan memperketat pengawasan mereka terhadap manajemen dalam rangka mempertahankan kinerja perusahaan yang baik agar berdampak pada keuntungan atau *feedback* dari kegiatan investasinya. Pemilik saham institusional akan mendorong pihak manajemen untuk mengungkapkan kebijakan anti korupsi di perusahaannya sebagai suatu upaya pencegahan dan bentuk komitmen perusahaan untuk anti korupsi. Penelitian Iriene dan Octavianus (2019) menyatakan bahwa ada korelasi positif antara kepemilikan institusional dengan pengungkapan perusahaan.

H3: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan anti korupsi.

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Kebijakan Anti Korupsi**

Korupsi menjadi ancaman besar bagi dunia bisnis sebab apabila perusahaan besar melakukan korupsi maka pemberitaannya akan lebih disorot oleh masyarakat dan menimbulkan kerugian baik material maupun non material. Maka sebagai upaya antisipasi dan mempertahankan kelangsungan hidupnya, perusahaan besar akan lebih terdorong mempublikasikan anti korupsinya dalam laporan tahunan perusahaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan besar akan lebih terdorong mengungkapkan kebijakan anti korupsinya sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan mempertahankan

kredibilitasnya. Penelitian Iriene dan Octavianus (2019) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa perusahaan besar cenderung menerima lebih banyak perhatian dari masyarakat umum dan kondisi ini menyebabkan perusahaan berada dibawah tekanan publik yang lebih besar untuk menunjukkan tanggung jawab sosialnya, salah satunya adalah dengan mengungkapkan kebijakan anti korupsi.

H4: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan anti korupsi.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif dengan menganalisis data sekunder. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang memfokuskan pada pengujian teori – teori dan kebenaran dari hipotesis melalui pengukuran dari variabel – variabel penelitian dengan menggunakan angka dan melakukan analisis data sesuai prosedur statistic (Ghozali, 2016). Sedangkan, data sekunder merupakan gambaran dari sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung tetapi melalui media perantara. Adapun populasi adalah keseluruhan dari objek/subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan Manufaktur yang melakukan pencatatan laporan tahunan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik tertentu yang dipilih melalui populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan suatu metode yang dilakukan dalam menentukan sampel dengan menetapkan beberapa kriteria berdasarkan pertimbangan tertentu yang memiliki tujuan untuk mendapatkan sampel yang bersifat *representative* (mewakili) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Asmawi, 2012). Teknik pengambilan sampel jenis ini hanya terbatas pada jenis sampel tertentu yang dapat memberi informasi yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel dengan *purposive sampling* tidak mempunyai karakteristik yang sama ketika digunakan pada setiap unitnya.

### **Teknik Pengumpulan Data**

#### **Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumentasi yaitu jenis data penelitian dalam bentuk arsip yang berisi apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi serta siapa saja yang terlibat dalam suatu kejadian tersebut, data ini dikumpulkan dari dokumen – dokumen yang diperoleh di Bursa Efek Indonesia (BEI).

#### **Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari lembaga penyedia data bukan dari obyek penelitian secara langsung. Data sekunder secara umum dalam bentuk catatan, bukti atau laporan histori yang telah disusun dalam arsip yang terpublikasi dan yang tidak terpublikasi. Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan.

#### **Cara Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Untuk mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi maka data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian kali ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dalam bentuk laporan tahunan

perusahaan pada periode tahun 2019 - 2021. Sumber data sekunder dalam penelitian ini didapat dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan *website* Bursa Efek Indonesia <https://www.idx.co.id/>. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data arsip. Teknik pengumpulan data arsip adalah teknik mengumpulkan data dari catatan atau basis data yang sudah ada.

## Variabel dan Definisi Operasional Variabel

### Variabel Dependen

Variabel terikat (dependent variabel) merupakan variabel yang dipengaruhi atau diterangkan oleh variabel lain. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan kebijakan anti korupsi. Berdasarkan Iriene dan Octavianus (2019) pengungkapan kebijakan anti korupsi adalah sebuah mekanisme untuk mencegah perilaku atau tindakan yang tidak etis seperti korupsi, yang kaitannya dengan praktik CSR untuk organisasi laba. Pengungkapan kebijakan Anti Korupsi yang menggunakan daftar pengungkapan kebijakan anti korupsi yaitu dengan cara memberikan skor "0" untuk setiap item yang tidak diungkapkan dan memberi skor "1" untuk setiap item yang diungkapkan dalam annual report perusahaan. Rumus dan item yang digunakan dalam penelitian ini merupakan duplikasi dari penelitian Karim dan Sasanti, (2016) adalah sebagai berikut:

$$PAK = \frac{X}{N}$$

PAK = Indeks Pengungkapan kebijakan Anti Korupsi

x = 1 jika item diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan.

N = Jumlah maksimal item yang harus diungkapkan berdasarkan peraturan GRI 205: Anti Korupsi 2016.

### Variabel Independen

#### Independensi Dewan Komisaris

Komisaris independen adalah komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi atau pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Variabel ini diukur dengan menggunakan perbandingan antara anggota dewan komisaris yang independen dengan keseluruhan anggota dewan komisaris. Variabel ini disimbolkan dengan IDK. Perumusannya adalah sebagai berikut:

$$IDK = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh anggota dewan komisaris}}$$

#### Komite Audit Independen

Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar, untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau melakukan tugas-tugas khusus (Irienen, 2019). Variabel ini diukur dengan menggunakan pembagian proporsi jumlah komite audit yang independen dengan keseluruhan jumlah komite audit di perusahaan tersebut. Variabel ini disimbolkan dengan KKA. Perumusannya adalah sebagai berikut:

$$KKA = \frac{\text{Jumlah komite audit yang independen}}{\text{Jumlah seluruh komite audit}}$$

#### Kepemilikan Institusional

Menurut Gumilang *et.al* (2015) kepemilikan institusional merupakan suatu keadaan ketika saham mayoritas suatu perusahaan dimiliki oleh sebuah lembaga seperti,

perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya. Variabel ini diukur dengan mencari perbandingan saham yang dimiliki institusi dengan jumlah saham yang beredar. Variabel ini disimbolkan KI. Perumusannya adalah sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

### Ukuran Perusahaan

Menurut Yulio (2016), ukuran perusahaan adalah pengelompokan perusahaan ke dalam beberapa kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan sedang dan perusahaan kecil yang didasarkan kepada total aset perusahaan. Variabel ini diukur dengan menggunakan logaritma natural dari total aset perusahaan. Variabel ini disimbolkan dengan UP.

### Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Berganda Analisis regresi merupakan metode statistik yang menjelaskan pola hubungan dua variabel dan/atau lebih melalui sebuah persamaan. Model regresi linier ini memiliki tujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua variabel dan/atau lebih variabel, serta untuk memprediksi kondisi di masa yang akan datang. Model regresi linier didasarkan pada hubungan fungsional/klausal yang antara dua dan/atau lebih dari satu variabel independen dengan satu variabel dependen.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah seluruh Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai tahun 2019-2021. Peneliti memilih perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian dikarenakan perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang berskala besar jika dibandingkan dengan perusahaan lain sehingga peneliti dapat melakukan penelitian yang lebih luas terkait masalah penelitian. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI juga mengalami perkembangan setiap tahunnya sehingga hal ini dapat menimbulkan persaingan antar perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaan untuk mencapai tujuan utamanya. Hal tersebut juga termasuk salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan utamanya. Tabel di bawah ini menyajikan tahapan seleksi sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Adapun prosedur pemilihan sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1**  
**Pemilihan Sampel**

No	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa efek Indonesia tahun 2019 - 2021	186
2.	Perusahaan yang tidak menerbitkan <i>Annual Report</i> secara berturut-turut tahun 2019 - 2021	(69)
3.	Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah tahun 2019 - 2021	(55)
4.	Laporan tahunan yang tidak menyajikan data mengenai data komit audit independen.	(32)
Total Sampel yang diambil		30

Sumber: Bursa Efek Indonesia 2021

### Analisis Deskriptif

Pada analisis deskriptif akan disajikan gambaran dari masing - masing variabel. Ada nilai mean yang digunakan untuk mengetahui jumlah rata - rata data yang bersangkutan satu sama lain. Standar deviasi yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar data yang bersangkutan serta ada nilai maksimum dan nilai minimum yang digunakan untuk mengetahui jumlah data yang paling besar dan data paling kecil dalam data penelitian tersebut. Uji statistik deskriptif pada penelitian ini akan disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
IDK	78	.167	1.000	.42238	.143782
KAI	78	.200	.750	.59525	.149196
KI	78	.334	.934	.69878	.132061
SIZE	78	9.786	18.315	15.17931	1.550249
PKAK	78	.368	.632	.47368	.101788
Valid N (listwise)	78				

Sumber Data: Data Sekunder yang diolah 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah data sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 78 dari 26 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dijadikan sampel dari periode 2019- 2021. Tabel 2 Menggambarkan variabel secara statistik serta menunjukkan hasil statistik deskriptif mengenai variabel independen dan dependen dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif dapat diketahui bahwa:

Variabel independen yang pertama yaitu Independensi Dewan Komisaris (IDK) menunjukkan hasil bahwa nilai minimum sebesar 0.167 dan nilai maksimum sebesar 1.000 Nilai rata-rata (mean) dari variabel Independensi Dewan Komisaris sebesar 0.422. Sedangkan untuk nilai standar deviasi pada variabel independensi dewan komisaris sebesar 0.143. Artinya bahwa perusahaan yang mengungkapkan kebijakan anti korupsi rata-rata mempunyai jumlah komisaris independen sebesar 42.2% dari total keseluruhan dewan komisaris.

Variabel independen yang kedua yaitu Komite Audit Independen (KAI) menunjukkan hasil bahwa nilai minimum sebesar 0.200 dan nilai maksimum sebesar 0.750. Nilai rata-rata (mean) pada variabel kompetensi komite audit sebesar 0.595. Sedangkan nilai standar deviasi pada variabel komite audit independen sebesar 0.149. Hal ini megindikasikan bahwa perusahaan yang mengungkapkan kebijakan anti korupsi rata-rata memiliki jumlah komite audit yang independen sebesar 59.5% dari total keseluruhan komite audit.

Variabel independen yang ketiga yaitu Kepemilikan Institusional (KI) menunjukkan hasil bahwa nilai minimum sebesar 0.334 dan nilai maksimum sebesar 0.934. Nilai rata-rata (mean) pada variabel ini sebesar 0.699 dan nilai standar deviasi variabel ini sebesar 0.132. Hal ini mengindikasikan bahwa pihak institusional pada perusahaan yang megungkapkan anti korupsi rata-rata memiliki saham kepemilikan institusional perusahaan sebesar 69.9%.

Variabel independen yang keempat yaitu ukuran perusahaan (SIZE) menunjukkan hasil bahwa nilai minimum sebesar 9.786 dan nilai maksimum sebesar 18.315. Nilai rata-rata (mean) pada variabel ini sebesar 15.179, sedangkan untuk nilai standar deviasi pada variabel ini sebesar 1.550. Perusahaan dengan ukuran besar cenderung akan mendapatkan perhatian

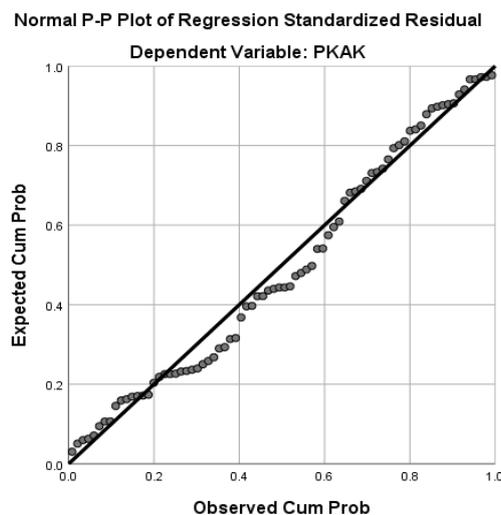
lebih dari masyarakat dan pemerintah. Perusahaan juga akan dihadapkan dengan risiko yang lebih besar pula karena perusahaan besar lebih banyak mengungkapkan informasi keuangan daripada perusahaan kecil.

Variabel dependen yaitu pengungkapan kebijakan anti korupsi menunjukkan hasil bahwa nilai minimum sebesar 0.368 dan nilai maksimum sebesar 0.632. Nilai rata-rata (mean) pada variabel dependen ini sebesar 0.473 dan nilai standar deviasi sebesar 0.102. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak perusahaan yang telah melakukan pengungkapan kebijakan anti korupsi rata-rata memiliki indeks pengungkapan kebijakan anti korupsi perusahaan sebesar 47.3%.

## Uji Normalitas Data

### Analisis Grafik

Model regresi yang baik adalah model yang mempunyai nilai residual. Cara melihat nilai residual berdistribusi dengan normal atau tidak adalah dengan menggunakan analisis grafik yaitu dengan melihat normal probability plot. Grafik normal probability plot disajikan pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1.

Grafik Normal Probability Plot

Sumber: Sumber Data: Data Sekunder yang diolah 2023

### Analisis Statistik

Dasar dalam pengambilan keputusan dengan memakai metode kolmogorov smirnov ini adalah jika signifikansi  $> 0,05$  maka data tersebut berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dengan kolmogorov smirnov digambarkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		78
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.07692976
Most Extreme Differences	Absolute	.086
	Positive	.086
	Negative	-.053
Test Statistic		.086
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber Data: Data Sekunder yang diolah 2023

Berdasarkan Tabel 3 tersebut, dapat dilihat bahwa hasil dari uji normalitas memiliki tingkat signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 yang artinya hal tersebut menunjukkan bahwa variabel penelitian terdistribusi dengan normal, karena tingkat signifikansinya  $0,200 > 0,05$  sehingga dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal. Jadi, dinyatakan layak digunakan dalam penelitian ini.

**Uji Multikolinearitas**

Multikolinearitas terjadi jika nilai *variance inflation factor* (VIF) < 10 dan nilai tolerance > 0,10. Jadi, berdasarkan hasil analisis regresi dengan program aplikasi SPSS 22, dapat diperoleh nilai tolerance dan *variance inflation factor* (VIF) untuk masing - masing variabel yang dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
IDK	.787	1.270
KAI	.845	1.183
KI	.994	1.006
SIZE	.679	1.473

a. Dependent Variable: PKAK

Sumber: Data Sekunder yang diolah 2023

Dari Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian tolerance menggunakan SPSS 22, menunjukkan bahwa variabel yang terdiri dari IDK, KAI, KI, dan SIZE tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0.100. Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan bahwa tidak ada satu variabel bebas yang mempunyai nilai VIF lebih dari 10. Maka dapat disimpulkan, bahwa data tidak terjadi multikolerasi antar variabel dalam model regresi.

### Uji Autokorelasi

Pengujian asumsi klasik ketiga adalah pengujian asumsi autokorelasi, yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi ini ialah dengan memperhatikan nilai dari Durbin Watson (DW) yang terletak diantara -2 hingga +2 ( $-2 \leq D-W \leq +2$ ) yang dihasilkan dari pengujian regresi, ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Autokorelasi Setelah Outlier**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.655 <sup>a</sup>	.429	.397	.079009	1.963

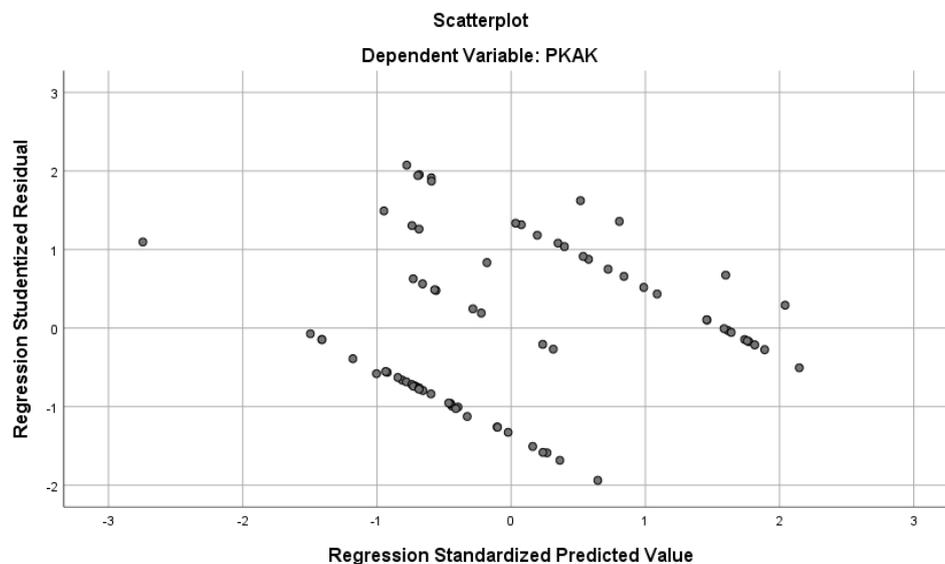
a. Predictors: (Constant), SIZE, KI, KAI, IDK  
 b. Dependent Variable: PKAK

Sumber: Data Sekunder yang diolah 2023

Dapat disimpulkan dengan perhitungan nilai Durbin Watson diantara angka -2 sampai +2 ( $-2 \leq 1,963 \leq +2$ ) dapat dilihat pada Tabel 5, bahwa hasil uji dari autokorelasi menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson (DW) terletak pada angka sebesar 1.963, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi adanya autokorelasi.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual tetap disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik digunakan adalah yang homokedastisitas. Ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik scatterplot yaitu titik yang menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil analisis uji heteroskedastisitas dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:



**Gambar 2.**  
**Hasil Uji Asumsi Heteroskedastisitas**  
 Sumber: Data Sekunder yang diolah 2023

Berdasarkan Gambar 2 pada grafik scatterplot dapat diketahui bahwa titik-titik plot tersebut tersebar secara acak baik diatas atau dibawah angka 0 yang terdapat pada sumbu Y (regression studentized residual) dan tidak membentuk pola corong. Maka, hasil dari uji heteroskedastisitas yang menggunakan grafik scatterplot dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi kasus atau adanya heteroskedastisitas.

**Analisis Regresi Linier Berganda**

Regresi linier berganda adalah suatu persamaan yang menggambarkan hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Analisis regresi linier berganda pada penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh independensi dewan komisaris, komite audit independen, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan terhadap pengungkapan kebijakan anti korupsi. Uji regresi linier berganda dikelompokkan menjadi pengujian secara parsial, simultan dan pengujian keterikatan antara variabel dependen dengan variabel independensi (R2). Berikut ini merupakan hasil dari analisis regresi linier berganda:

**Tabel 6**  
**Analisis Regresi Linier Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.016	.147		-.106	.916		
	IDK	.259	.071	.366	3.670	.000	.787	1.270
	KAI	-.196	.066	-.287	-2.980	.004	.845	1.183
	KI	-.062	.068	-.081	-.914	.364	.994	1.006
	SIZE	.036	.007	.542	5.046	.000	.679	1.473

a. Dependent Variable: PKAK

Sumber: Data Sekunder yang diolah 2023

Berdasarkan persamaan regresi pada Tabel 6 di atas, maka dapat berikut model yang didapatkan regresi linear berganda yang diperoleh adalah:

Koefisien Regresi Independen Dewan Komisaris (IDK) Nilai koefisien independensi dewan komisaris (IDK) sebesar 0.259 yang artinya independensi dewan komisaris (IDK) menunjukkan arah positif (searah) dengan variabel pengungkapan kebijakan anti korupsi pada perusahaan manufaktur. Pengaruh positif disini artinya dewan komisaris independen dapat meningkatkan pengungkapan kebijakan anti korupsi sebesar 0.259 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Koefisien Regresi Komite Audit Independen (KAI) nilai koefisien komite audit independen (KAI) sebesar -0.196 yang artinya komite audit independen (KAI) menunjukkan arah negatif (tidak searah) dengan variabel pengungkapan kebijakan anti korupsi pada perusahaan manufaktur. Pengaruh negatif disini artinya tidak mempunyai hubungan yang searah dengan dengan variabel pengungkapan kebijakan anti korupsi pada perusahaan manufaktur. Hal ini dapat diinterpretasikan dimana dewan komite audit dapat meningkatkan pengungkapan kebijakan anti korupsi sebesar -0.196 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Koefisien Regresi Kepemilikan Institusional (KI) Nilai koefisien sebesar -0.062 yang artinya kepemilikan institusional (KI) menunjukkan arah negatif (tidak searah) dengan variabel pengungkapan kebijakan anti korupsi pada perusahaan manufaktur. Pengaruh negatif disini artinya tidak mempunyai hubungan yang searah dengan dengan variabel pengungkapan kebijakan anti korupsi pada perusahaan manufaktur. Hal ini dapat diinterpretasikan dimana kepemilikan institusional dapat meningkatkan pengungkapan kebijakan anti korupsi sebesar -0.062 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Koefisien Regresi Ukuran Perusahaan (SIZE) Nilai koefisien ukuran perusahaan sebesar 0.036 yang artinya ukuran perusahaan (UP) menunjukkan arah positif (searah) dengan variabel pengungkapan kebijakan anti korupsi pada perusahaan manufaktur. Pengaruh positif disini artinya mempunyai hubungan yang searah dengan dengan variabel pengungkapan kebijakan anti korupsi pada perusahaan manufaktur. Hal ini dapat diinterpretasikan dimana ukuran perusahaan dapat meningkatkan pengungkapan kebijakan anti korupsi sebesar 0.036 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

### Uji Goodness of Fit (Uji F)

Uji F digunakan dengan melihat signifikansi F pada output hasil regresi dengan signifikansi 0.05. Jika nilai signifikan lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$  maka hipotesis diterima, yang berarti bahwa model regresi dapat dikatakan fit/layak dan ketika  $\alpha = 5\%$  lebih besar maka hipotesis ditolak, yang berarti bahwa model regresi tersebut tidak layak. Hasil dari uji F dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Uji Goodness of Fit**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.342	4	.086	13.700	.000 <sup>b</sup>
	Residual	.456	73	.006		
	Total	.798	77			

a. Dependent Variable: PKAK

b. Predictors: (Constant), SIZE, KI, KAI, IDK

Sumber: Data Sekunder yang diolah 2023

Berdasarkan hasil uji statistik F pada Tabel 7, menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 13.700 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 karena probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0.05 ( $\alpha = 5\%$ ), sehingga kesimpulannya model yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk digunakan. Dengan demikian, model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi pengungkapan anti korupsi atau dapat dikatakan bahwa variabel independen yang digunakan oleh masing - masing model regresi tersebut secara simultan berpengaruh terhadap pengungkapan kebijakan anti korupsi. Maka dari itu, independen dewan komisaris (IDK), kepemilikan institusional (KI), komite audit independen (KAI), ukuran perusahaan (SIZE) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya yaitu pengungkapan kebijakan anti korupsi (PKAK).

### Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Pada penelitian ini juga melakukan analisis pada nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan pada hasil analisis regresi linier berganda pada Tabel 8 sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.655 <sup>a</sup>	.429	.397	.079009	1.963

a. Predictors: (Constant), SIZE, KI, KAI, IDK

b. Dependent Variable: PKAK

Sumber: Data Sekunder yang diolah 2023

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 8, diketahui bahwa model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai nilai koefisien determinasi model regresi

sebesar 0.429 yang berarti bahwa IDK, KI, KAI, SIZE dapat menjelaskan variabel PKAK sebesar 0.429 atau 42.9%. Sedangkan sisanya sebesar 0.571 atau 57.1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian.

**Uji Statistik t (Uji t)**

Uji t dilakukan dengan melihat nilai signifikansi masing - masing variabel pada output atau hasil regresi dengan signifikansi 0.05. Kriteria pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikansi > 0.05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan) dan sebaliknya jika nilai signifikansi < 0.05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Dari pengujian hipotesis secara parsial didapatkan hasil perhitungan uji t seperti yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 9**  
**Hasil Uji Statistik t**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.016	.147			-.106	.916		
IDK	.259	.071	.366		3.670	.000	.787	1.270
KAI	-.196	.066	-.287		-2.980	.004	.845	1.183
KI	-.062	.068	-.081		-.914	.364	.994	1.006
SIZE	.036	.007	.542		5.046	.000	.679	1.473

a. Dependent Variable: PKAK

Sumber: Data Sekunder yang diolah 2023

**Pengaruh Independen Dewan Komisaris (IDK) terhadap Pengungkapan kebijakan Anti Korupsi (PKAK).**

Hasil pengujian variabel independent dewan komisaris pada Tabel 10, menghasilkan nilai t-hitung sebesar 3.670 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 yang berarti kurang dari 0.05 atau 0.000 < 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kebijakan anti korupsi. Maka dapat disimpulkan bahwa (H1) diterima.

**Pengaruh Komite Audit Independen (KAI) terhadap Pengungkapan Kebijakan Anti Korupsi (PKAK).**

Hasil pengujian variabel komite audit pada Tabel 10, menghasilkan nilai t-hitung sebesar -2.980 dengan nilai signifikansi sebesar 0.004 yang berarti kurang dari 0.05 atau 0,004 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel komite audit independen berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kebijakan anti korupsi. Maka dapat disimpulkan bahwa (H2) diterima.

**Pengaruh Kepemilikan Institusional (KI) terhadap Pengungkapan Kebijakan Anti Korupsi (PKAK).**

Hasil pengujian variabel komisaris independen pada Tabel 10, menghasilkan nilai t-hitung sebesar -0.914 dengan nilai signifikansi sebesar 0.364 yang berarti lebih besar dari 0.05 atau 0.364 > 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan kebijakan anti korupsi. Maka dapat disimpulkan bahwa (H3) ditolak.

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan (SIZE) terhadap Pengungkapan Kebijakan Anti Korupsi (PKAK).**

Hasil pengujian variabel ukuran perusahaan pada Tabel 10, menghasilkan nilai t-hitung sebesar 5.046 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti kurang dari 0,05 atau  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kebijakan anti korupsi. Maka dapat disimpulkan bahwa (H4) diterima.

### **Pembahasan**

#### **Pengaruh Independensi Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Kebijakan Anti Korupsi.**

Hasil output SPSS menunjukkan bahwa variabel independensi dewan komisaris yang diukur dengan jumlah anggota dewan komisaris memiliki signifikansi sebesar 0.000. Angka tersebut kurang dari taraf signifikansi 5% (0.05) sehingga berdasarkan hasil tersebut, maka H1 diterima. Hasil ini menyatakan bahwa independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan anti korupsi pada perusahaan. Pengaruh positif disini artinya dewan komisaris independen mempunyai hubungan yang searah dengan pengungkapan kebijakan anti korupsi pada perusahaan sebesar 0.259 dengan asumsi variabel lainnya konstan. Dengan semakin banyak independen dewan komisaris maka semakin ketat pengawasan yang terjadi di perusahaan. Selain itu, dewan komisaris juga punya kewajiban untuk menjaga kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lain di dalam perusahaan.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Healy dan Serafeim (2015) yang dikutip dalam de Melo (2015) serta Joseph *et al.*, (2016). Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian Lestari dan Cahyonowati (2013), yang menyatakan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan kebijakan anti korupsi.

#### **Pengaruh Komite Audit Independen Terhadap Pengungkapan Kebijakan Anti Korupsi.**

Hasil output SPSS menunjukkan bahwa variabel komite audit independen yang diukur dengan jumlah anggota komite audit yang independen dengan jumlah anggota komite audit memiliki signifikansi sebesar 0.004. Angka tersebut kurang dari taraf signifikansi 5% (0.05) sehingga berdasarkan hasil tersebut, maka H2 diterima. Hasil ini menyatakan bahwa komite audit yang independen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan kebijakan anti korupsi pada perusahaan. Pengaruh negatif disini artinya komite audit independen tidak mempunyai hubungan yang searah dengan dengan variabel pengungkapan kebijakan anti korupsi pada perusahaan sebesar -0.196 dengan asumsi variabel lainnya konstan. Independen komite audit merupakan salah satu ujung tombak dalam keberhasilan sebuah perusahaan, dimana ia harus mengawasi sistem pelaporan keuangan yang merupakan posisi vital dan paling sering di salah gunakan oleh sebagian orang dalam memuaskan kehidupan pribadi. Dalam menjalankan tugasnya komite audit harus memiliki sikap independensi seperti yang dipaparkan oleh Agrawal bahwa Independensi adalah faktor yang penting dalam komite audit supaya dapat mengatasi konflik kepentingan. Independensi merupakan karakteristik terpenting yang harus dimiliki oleh komite audit untuk memenuhi peran pengawasannya.

Merujuk kepada penelitian terdahulu serta konsep yang dipaparkan penulis dalam tinjauan pustaka maka Independensi merupakan hal vital yang harus dimiliki oleh anggota komite audit, Komite Audit akan mempersembahkan kinerja terbaik jika anggotanya memiliki Independensi dalam mengemukakan sikap dan pendapat. Hal ini selaras dengan penelitian Bedard dan Musallam (2018).

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan Kebijakan Anti Korupsi.**

Hasil output SPSS menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional yang diukur dengan jumlah saham institusi perusahaan dibagi dengan jumlah saham beredar yang memiliki signifikansi sebesar 0.364. Angka tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 5% (0.05) sehingga berdasarkan hasil tersebut, maka H<sub>3</sub> ditolak. Hasil ini menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan kebijakan anti korupsi pada perusahaan sebesar -0.062 dengan asumsi variabel lainnya konstan. Hal ini diduga disebabkan karena struktur kepemilikan saham di Indonesia cenderung terkonsentrasi. Pemilik saham terkonsentrasi sebagai investor bisa saja memiliki kecenderungan beritikad buruk, artinya bahwa niat investasinya hanya berdasar pada kepentingan sendiri saja. Sehingga pemilik saham terkonsentrasi mempedulikan pengungkapan informasi yang dilakukan perusahaan. Selain itu apabila dilihat dari perspektif investasi, kemungkinan investor institusional memiliki perspektif jangka pendek. Akibatnya investor tersebut hanya peduli terhadap kenaikan harga saham jangka pendek, tanpa mempedulikan bagaimana pemantauan atau tata kelola yang ada di perusahaan. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Iriene dan Octavianus, (2019).

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Kebijakan Anti Korupsi.**

Hasil output SPSS menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan yang diukur dengan *log natural* total asset dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0.000. Angka tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 5% (0.05) sehingga berdasarkan hasil tersebut, H<sub>4</sub> diterima. Hasil ini menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan anti korupsi. Pengaruh positif disini artinya ukuran perusahaan mempunyai hubungan yang searah dengan pengungkapan kebijakan anti korupsi pada perusahaan sebesar 0.036 dengan asumsi variabel lainnya konstan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan akan mendorong pengungkapan kebijakan anti korupsi di perusahaan. Semakin besar perusahaan tentu semakin besar jaringan relasi dengan berbagai pihak. Selain perusahaan besar akan lebih mendapatkan perhatian khusus maupun kepercayaan dari publik atau dengan kata lain lebih menjadi sorotan publik. Maka untuk tetap menjaga nama baik perusahaan dan kepercayaan publik perusahaan besar akan melakukan upaya pembuktian bahwa kegiatan bisnis yang berlandaskan etika kejujuran dan mengungkapkan segala informasi mendukung. Korupsi menjadi ancaman besar bagi dunia bisnis sebab apabila perusahaan besar melakukan korupsi maka pemberitaannya akan lebih disorot oleh masyarakat dan menimbulkan kerugian baik material maupun non material. Penelitian Tirtasari dan Hartomo (2019) yang memaparkan bahwa perusahaan yang besar cenderung menerima lebih banyak perhatian dari masyarakat umum dan kondisi ini menyebabkan perusahaan berada dibawah tekanan publik yang lebih besar untuk menunjukkan tanggung jawab sosialnya, salah satunya adalah dengan mengungkapkan kebijakan anti korupsi. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Iriene dan Octavianus (2019) dan dilakukan Healy dan Serafeim (2011).

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Simpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut: Variabel independensi dewan komisaris berpengaruh terhadap positif pengungkapan kebijakan anti korupsi, (2) Variabel komite audit independen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan kebijakan anti korupsi, (3) Variabel kepemilikan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan kebijakan anti korupsi pada perusahaan manufaktur. (4) Variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan anti korupsi.

## Saran

Dalam sebuah perusahaan diharapkan memiliki minimal 2-3 komisaris yang independen sehingga dalam pengawasan dan pengambilan keputusan berdasarkan laporan keuangan dapat bersifat objektif dan semakin ketat dalam pengawasannya. Dengan itu menjadikan langkah baik untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan dan mendorong pengungkapan informasi mengenai anti korupsi sehingga terus meningkatkan kredibilitas perusahaan. Jajaran pimpinan perusahaan diharapkan dapat mengkaji ulang dan melakukan evaluasi tata kelola yang di imbangi dengan pengendalian internal yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Allegrini, M. and G. Greco. 2013. Corporate Boards, Audit Committees And Voluntary Disclosure: Evidence From Italian Listed Companies. *Journal of Management and Governance*, 17(1): 187-216.
- Asmawi, L. 2012. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Perusahaan Rokok yang Terdaftar di BEI). *Jurnal Akuntansi AKUNESA* 1(1): 1-21.
- Berthelot, S. and A. M. Robert. 2011. Climate change disclosures: An examination of Canadian oil and gas firms. *Journal of Social and Environmental Accounting*, 5(1): 106-123.
- De'Melo, R. B. E. 2015. Essays On Anti-Corruption Disclosure. ProQuest Dissertations and Theses, 25(2): 1-103.
- Gumilang, F., Suhadak dan S. Mangesti. 2015. Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Asimetri Informasi Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011 -2013). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 23(1): 1-8.
- Ghozali, I. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Edisi Kedelapan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Healy, P., and G. Serafeim. 2015. Causes and Consequences of Firms' Self-Reported Anticorruption Efforts. *SSRN Electronics Journal*, 5: 1-43
- \_\_\_\_\_. 2011. Causes and Consequences of Firms' Self-Reported Anticorruption Efforts. *SSRN Electronics Journal*, 5: 1-43
- Iriene, D.A. dan D. H. Octavianus. 2019. Pengaruh GCG dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Kecenderungan Terhadap Mengungkapkan Kebijakan anti Korupsi. *Jurnal Akuntansi Bisnis*. 17(2).
- Jensen, M. C. dan W. H. Meckling. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, Agency cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economic* 3(4): 305-360.
- Joseph, C., J. Gunawan, Y. Sawani, M. Rahmat, J. A. Noyem, and F. Darus. 2016. A comparative study of anti-corruption practice disclosure among Malaysian and Indonesian Corporate Social Responsibility (CSR) best practice companies. *Journal of Cleaner Production*, 112: 2896-2906.
- Lestari, P. P. dan Cahyonowati. 2013. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2(4), 1-13.
- Luh. P. V. 2021. Pengaruh GCG, ukuran perusahaan dan leverage terhadap kinerja keuangan. *Jurnal Akuntansi Ekonomi*. Surabaya.
- Karim, N. K. dan E. E. Sasanti. 2016. Pengungkapan Anti Korupsi dan Kinerja Keuangan Perusahaan: Studi Kasus Perusahaan Terdaftar Di Indeks Sri Kehati. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 15(2): 28-52.
- Musallam, S. R. M. 2018. The Direct and Indirect effect of the existence of risk management on the relationship between audit committee and corporate social responsibility disclosure. *Benchmarking: An International Journal*, 315: 1-16

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33 tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Diunduh pada tanggal 15 November 2022, dari [http://eodb.ekon.go.id/download/peraturan/lainlain/ojk/POJK\\_33\\_2014.pdf](http://eodb.ekon.go.id/download/peraturan/lainlain/ojk/POJK_33_2014.pdf)
- Putra, A. A. 2016. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 27(2): 1-16.
- Tirtasari, dan Hartomo. 2019, Pengaruh Elemen *Good Corporate Governace* dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Kecenderungan Mengungkapkan Kebijakan Anti Korupsi di Indonesi, Unika Soegijapranata Semarang.
- Tugiman, H. 2019. *Sekilas komite audit*. PT.Eresco anggota IKAPI. Bandung.
- Widyatama, A. 2014. *Good Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility : Sebuah Tinjauan Empiris*. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 2: 312-321.
- Yulio, W. S. 2016. Pengaruh Konvergensi IFRS, Komite Audit dan Kompleksitas Perusahaan Terhadap Fee Audit. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, XV(29): 77-92. <https://www.idx.co.id/>.